

MODEL PELAYANAN SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR

Ummi Karimah

14040254016 (PPKn, FISH, UNESA) ummikarimah@mhs.unesa.ac.id

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui model pelayanan sosial anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur terhadap anak dari tindak kekerasan fisik; (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan landasan teori model pelayanan *Half-Way House Services* dan analisis SWOT. Adapun model pelaksanaan pelayanan terdiri dari identifikasi masalah, penyelidikan, intervensi sosial dan terminasi yang berfokus pada anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Pada pelayanan sosial anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yaitu (a) Pelaporan; (b) Kunjungan; (c) Rujukan; (d) Monitoring dan Evaluasi; serta (e) Terminasi. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak adalah kesadaran keluarga dan masyarakat tentang perlindungan anak serta haknya, dan SDM pendamping dalam pelayanan sosial anak. Pencegahan kekerasan fisik pada anak bisa dimulai dari keluarga, masyarakat, sekolah sehingga sistem perlindungan anak yang dibangun menjadi sistem pencegahan kekerasan fisik yang terjadi pada anak.

Kata Kunci: Model Pelayanan Sosial Anak, Kekerasan Fisik, Lembaga Perlindungan Anak

Abstract

The objectives of this study are (1) To find out the social service model of children carried out by the East Java Child Protection Institute for children from physical violence; (2) To determine the supporting and inhibiting factors of social services for children victims of physical violence at the East Java Child Protection Institute. This study uses the theoretical foundation of the Half-Way House Services service model and SWOT analysis. The service delivery model consists of problem identification, investigation, social interaction and termination that focuses on children who are victims of physical violence. In the social services of children in the East Java Child Protection Institute, namely (a) Reporting; (b) Visitation; (c) Referral; (d) Monitoring and Evaluation; and (e) Termination. Constraints experienced in the implementation of children's social services are family and community awareness about child protection and their rights, and accompanying HR in child social services. Prevention of physical violence against children can be started from the family, community, school so that the child protection system is built into a system of preventing physical violence that occurs in children.

Keywords: Child Social Service Model, Physical Hardness, Child Protection Institution

PENDAHULUAN

Setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama dan bahasa memiliki hak atas kelangsungan hidupnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak-UUPA). Dalam pasal 4 UUPA menyatakan bahwa, "setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yakni:

"...Pertama, hak atas hidup yang layak dan pelayanan kesehatan; kedua, hak untuk berkembang yaitu hak atas pendidikan informasi kebebasan berpikir; ketiga, hak perlindungan yaitu hak untuk mendapat perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenangnya dalam peradilan; keempat, hak partisipasi yaitu hak kebebasan mengemukakan pendapat berkumpul dan berserikat dalam mengambil keputusan yang menyangkut pada dirinya..."

Namun, dalam prakteknya hak yang seharusnya mereka dapatkan seringkali dilanggar berupa praktek kekerasan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya mendapatkan hak dan kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek tindak sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Barker (dalam Huraerah, 2012:44) mendefinisikan *child abuse*, yaitu “kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak”.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan disengaja yang berupa tindakan ancaman fisik maupun psikis. Bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, penyerangan serta pengroyokan yang dialami oleh anak yang tidak disadari oleh semua orang. Tindak kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan di kota-kota besar. Selain terjadinya kekerasan di kota besar, sering juga terjadi sektor industri, dunia pendidikan, kehidupan sehari-hari dan bahkan di lingkungan keluarga yang sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak-anak. Tidak sedikit korban dari *child abuse* tersebut harus kehilangan nyawa.

Seperti kasus cedera berat yang dialami oleh seorang siswi di SMAN 1 Gondang, Mojokerto, Mas Hanum Dwi Aprilia, setelah menjalani hukuman *squat jump* di sekolahnya lantaran terlambat datang ke kegiatan ekstrakurikuler Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya. Hanum mendadak mengalami kelumpuhan usai menerima hukuman yang diberikan seniorinya pada Jumat pagi tanggal 13 Juli 2018. Kelumpuhan itu dialaminya saat melakukan hukuman lompat jongkok (*squat jump*) sebanyak 200 kali. (Sindonews.com diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

Kasus yang terjadi pada MS menjadi korban perundungan (*bullying*) oleh tiga siswa di SMPN 18 pada Senin 5 Maret 2018. Dia diseret keluar kelas lalu dikeroyok, karena menolak mengikuti pertandingan futsal yang akan digelar di sekolah. Salah satu pelaku memukul dan melempar dengan batu bata ke bagian wajahnya hingga mengalami luka serius (Sindonews.com diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

Kekerasan yang dialami anak dapat dilihat dari berbagai lingkup atau tempat antara lain: (1) Domestik, Kekerasan dilingkup domestik merupakan tempat anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang melakukannya adalah anggota keluarga sendiri seperti ayah dan ibu; (2) Lingkup publik ataupun lingkup umum merupakan tempat selain dalam lingkup domestik atau keluarga seperti contoh dilingkungan pelayanan umum biasanya anak juga sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain selain dari keluarganya; (3) Pelayanan pendidikan, tindak kekerasan yang dialami anak di ranah pendidikan formal (sekolah/madrasah), non formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan informal (dalam keluarga) sering terjadi tanpa disadari

oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Restuwati (2014) menghasilkan bahwa faktor belum terlaksananya perlindungan hukum kepada anak yaitu penyelesaian kasus kekerasan anak menggunakan penyelesaian adat dan kekeluargaan sehingga tidak memberikan perlindungan apapun yang sesuai dengan kebutuhan anak. Di pihak masyarakat, masyarakat tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami anak dengan dalih untuk menutupi aib keluarga. Hal ini menjadi kendala oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan yang dialami oleh anak. ternyata banyak faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan anak.

Kondisi lingkungan sosial yang juga dapat terjadinya kekerasan terhadap anak ada beberapa faktor diantaranya adalah adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtuanya sendiri serta nilai masyarakat yang individualis. Meskipun masyarakat atau tetangganya mengetahui dan mendengar jerit kesakian dan tangisan anak yang dihajar oleh orang tuanya, tapi karena pemahaman masalah hal tersebut merupakan sebuah masalah intern keluarga masing-masing dan memilih diam serta tidak ingin ikut campur.

Di dalam keluarga juga persoalan kekerasan anak merupakan sebuah aib karena yang melakukan adalah salah satu dari anggota keluarganya terhadap anak. Alasan memilih diam tidak membela atau melaporkan anak yang telah mengalami kekerasan adalah menjaga agar aib atau masalah tersebut tidak menyebar atau bahkan tidak menjadi bahan pergunjungan. Sehingga hal ini merupakan suatu hal sulit bagi negara atau pihak yang berwenang untuk melindungi hak anak tersebut dari tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik.

Jika diamati, sering media massa melaporkan kejadian kasus *child abuse*, seperti kasus penelantaran anak, bayi yang dibunuh orang tua sendiri, anak yang dibawah umur diperkosa oleh orang terdekatnya, guru yang ringan tangan terhadap anak muridnya, anak yang diculik, dianiaya. Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak yang seringkali tidak disadari oleh semua orang.

Berdasarkan data monitoring KPAI yang diberikan kepada *Validnews*, di tahun 2018 yang belum genap satu bulan ini ditemukan sejumlah kekerasan terhadap anak di dalam rumahnya sendiri. Sebelumnya seorang anak diduga selama setahun disekap orang tua di Malang Jawa Timur. Kemudian dilaporkan adanya seorang anak di Kalimantan Timur meninggal yang diduga mengalami kekerasan fisik oleh ayah tirinya. Kemudian baru-baru ini seorang anak usia dua tahun di Tasikmalaya juga

meninggal diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh tantenya. Laporan terbaru yang diterima KPAI yakni adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya di kota Bogor (KPAI, diakses pada 18 Januari 2018).

Kurangnya pemahaman tentang perlindungan hak-hak anak dan menganggap kasus kekerasan terhadap anak atau *child abuse* merupakan persoalan yang dianggap tidak layak untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti yang dikatakan Harkrisnowo (dalam Suyanto, 2010:18), bahwa rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya disebabkan sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan yang dialami anak-anak tidak direkam oleh aparat sebagai bentuk tindak pidana.

Siti Fatimah (dalam Suyanto :2010) faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, masalah keluarga, faktor perceraian, kelahiran anak di luar nikah, permasalahan jiwa atau psikologis, dan tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan klaster Perlindungan Anak, Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2016 kasus kekerasan anak menurun berdasar empat jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Pada tahun 2013 terdapat 878 kasus. Tahun 2014 meningkat menjadi 1161 kasus, tahun 2015 menurun menjadi 674 kasus dan tahun 2016 menurun menjadi 389 kasus. Selain itu, data pengaduan kasus kekerasan anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Data Pegaduan Kasus Kekerasan Anak di LPA Jatim tahun 2014-2017

Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus				Total
	2014	2015	2016	2017	
Seksual	27	14	11	12	64
Fisik	36	6	10	8	60
Psikis	3	5	-	-	8
Sosial	1	35	-	5	43
Jumlah Kekerasan	67	60	21	25	173

Sumber : Data Primer LPA Jatim

Tabel 1 menunjukkan praktek kekerasan terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengalami penurunan mulai tahun 2014 sampai tahun 2017. Jumlah kekerasan dari empat tahun tersebut

menempatkan kasus kekerasan fisik menjadi urutan tertinggi yaitu 37%. Jumlah terendah yaitu kekerasan psikis 4,6% kasus. Pada tahun 2014 kekerasan terbanyak yaitu kekerasan fisik sekitar 53,7%, sedangkan tahun 2017 kekerasan fisik menurun. Dari data pengaduan kasus kekerasan anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan juga KPAI setiap tahunnya banyak kasus kekerasan yang menurun secara signifikan terutama kekerasan fisik yang mengalami penurunan secara drastis.

Negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi dasar menjamin memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara juga menjamin terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini menjelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menggambarkan tujuan negara. UUD 1945 juga merupakan landasan dasar terhadap penegakan hukum.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang berguna untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Jadi, anak yang dilindungi adalah semua anak tanpa terkecuali. Tujuan perlindungan anak adalah terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia serta sejahtera.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga sosial yang berkiprah dalam perlindungan anak untuk melakukan pelayanan sosial terhadap anak yang belum atau telah menjadi korban kekerasan. Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur (LPA Jatim) didirikan sejak tanggal 18 Desember 1998 oleh sejumlah stakeholder yang terdiri dari Instansi atau Dinas Pemerintah terkait, Lembaga swadaya peduli anak, perguruan tinggi, media massa, dan pemerhati anak. Berdirinya Lembaga Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengertian dan kesadaran hak-hak anak, sekaligus mengadvokasikan kepada institusi Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Keluarga untuk peduli terhadap hak-hak anak, mengeliminasi praktek kekerasan, diskriminasi dan penelantaran anak.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh LPA Jatim antara lain: menyebarluaskan hak-hak anak sesuai KHA, UUPA dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan anak lainnya; pemberdayaan peran keluarga terhadap Perlindungan Anak; memonitor berbagai bentuk

kekerasan (*child abuse*) dan eksploitasi anak; melakukan rujukan atas kasus-kasus anak; melakukan kajian permasalahan anak; melakukan advokasi hak-hak anak; mengembangkan kapasitas anggota jaringan. Kegiatan di LPA Jatim dalam perlindungan anak diharapkan mewujudkan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak dengan cara mengembangkan informasi tentang hak anak serta melakukan pelayanan sosial terhadap anak yang belum atau telah mengalami kekerasan fisik.

Kegiatan yang dilakukan oleh LPA Jatim dalam menjalankan program kegiatannya mendapat pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri secara sah dan tidak mengikat demi kepentingan terbaik bagi anak LPA Jatim mendapatkan pendanaan dalam melakukan program kegiatannya antara lain dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas atau Instansi terkait, UNICEF, ILO, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Campaign of Tobacco Free for Kids* (CTFK), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan beberapa sektor swasta serta BUMN.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asih (2012), hal yang dibahas adalah tentang anak yang mendapat kekerasan secara verbal. Kapan anak tersebut mendapat perilaku kasar dan bagaimana perasaan serta respon anak tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian di atas fokus penelitian adalah pada anak sedangkan penelitian ini berfokus pada lembaga yang menangani kekerasan fisik terhadap anak. Selain itu fokus penelitian ini adalah bentuk kegiatan pelayanan sosial anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan fisik pada anak.

Perlu adanya usaha perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga amanat yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia yang berupa melindungi segenap bangsa Indonesia terlaksana dengan baik. Maka dari itu dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak diharapkan dapat mengurangi permasalahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan-kegiatan pendampingan bagi anak baik sebelum atau sesudah mengalami kekerasan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan: (1) Bagaimana model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur?; (2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur?

Tujuan penelitian ini yakni: Untuk mengetahui model pelayanan sosial anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur terhadap anak dari tindak kekerasan fisik; (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model pelayanan *Half-way House Services* menurut Soetarto (1996) yang terdiri dari identifikasi masalah; penyelidikan; intervensi sosial dan terminasi. Dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak dikenal juga dengan proses pertolongan atau proses pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial sebagai wujud praktik dari pekerjaan sosial, maka pelayanan sosial yang diberikan pendamping berkaitan dengan proses pekerjaan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam mengenai kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif ini menurut Moleong (2007:6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, mendeskripsikan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik, serta berusaha mendeskripsikan faktor penguat yang menjadi pendorong pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Lokasi penelitian yang bertempat di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur jalan Bendul Merisi no.2, Surabaya. Lokasi ini dipilih karena adanya Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dari tindak kekerasan khususnya kekerasan fisik. Salah satu kegiatan perlindungan anak yaitu adanya pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik. LPA Jatim merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Lembaga ini memiliki jaringan kerjasama diantaranya dinas kesehatan, dinas pendidikan, kepolisian serta merupakan jaringan dari KPAI.

Sanafiah Faisal (dalam Sugiono, 2005:303) kriteria informan adalah sebagai berikut: (a) mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; (b) mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlihat pada kegiatan yang tengah diteliti; (c) mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi; (d) mereka yang tidak

cenderung menyampaikan informasi hasil “kemauannya” sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk pengambilan sumber data dengan menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang mendapat data secara maksimal. Informan penelitian ini yaitu Bapak Priyono Adi Nugroho selaku pengelola bidang advokasi; Bapak Adi Kurniawan pengelola bidang pelayanan anak serta Ibu Noer Hayati pengelola bidang humas di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

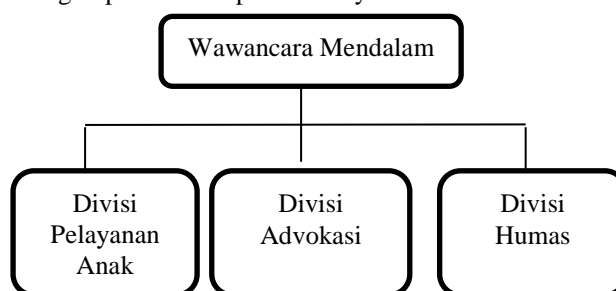
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pertama, observasi, objek observasi peneliti adalah lingkungan dan kegiatan di LPA Jatim. Observasi yang digunakan dalam penelitian model pelayanan anak korban kekerasan fisik di LPA Jatim adalah observasi partisipan dimana peneliti diharuskan untuk mengamati dengan mengikuti kegiatan secara langsung. Alasan penggunaan pengamatan adalah karena teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:174-175). Hal ini sesuai dengan penelitian model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di LPA Jatim yang mengharuskan proses mengamati itu ada. Alasan kedua, karena teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri bagaimana lingkungan LPA Jatim, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya Teknik pengamatan ini memungkinkan untuk peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data informan di LPA Jatim. Observasi partisipan ini digunakan untuk mengambil data terkait: (1) lingkungan LPA Jatim; (2) data anak korban kekerasan fisik dan (3) kegiatan pelayanan di LPA Jatim.

Kedua, penelitian model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di LPA Jatim menggunakan wawancara secara mendalam. Hal ini relevan dengan tujuan peneliti yang memang ingin menggali informasi secara detail dan mendalam dari informan. Alasan memilih wawancara, karena wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari pengelola LPA Jatim, dan korban kekerasan fisik. Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang model pelayanan Sosial anak korban kekerasan fisik di LPA Jatim. Wawancara dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tatap muka dengan sumber data dan membawa pedoman wawancara (interview guide) dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan mengenai kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh LPA Jatim.

Ketiga, dokumentasi dalam penelitian model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di LPA Jatim adalah dokumen berupa struktur LPA Jatim, visi misi, program LPA Jatim, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:217), alasan memilih dokumentasi dalam penelitian ini adalah: (1) dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (2) berguna sebagai bukti dalam suatu pengujian; dan (3) pada penelitian ini dokumen sangat penting sebagai bukti. Dokumen ini bisa berupa foto maupun data administratif yang lain mengenai LPA Jatim. Data yang akan diambil menggunakan teknik dokumentasi ini terkait: (1) visi Misi LPA Jatim; (2) profil LPA Jatim; dan (3) dokumen lain yang dianggap perlu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Hubberman yakni: (1) reduksi data, data yang direduksi adalah data kekerasan terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur; (2) penyajian data, setelah mengkategorikan jenis kekerasan terhadap anak dalam reduksi data memfokuskan data mana yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini berfokus terhadap kekerasan fisik dengan alasan kekerasan fisik lebih mudah dikenali atau terlihat secara fisik. Untuk itu dibutuhkannya pengangan terhadap anak korban kekerasan fisik; (3) penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penanganan kekerasan fisik dapat dilakukan dengan model pelayanan sosial bagi anak

Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber pada penelitiannya. Triangulasi teknik merupakan suatu cara dalam menguji kredibilitas data dilapangan untuk mengecek data kepada sumber yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan triangulasi sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda (informan terkait). Adapun bagan di bawah ini yang menunjukkan kepada sumber mana saja peneliti akan mengumpulkan data penelitiannya.



Bagan 3.1 Sumber Data Penelitian Melalui Wawancara Mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

Hasil observasi yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur menunjukkan kegiatan pelayanan sudah dimulai sejak 4 April 1999. Hal yang melatar belakangi kegiatan pelayanan anak korban kekerasan fisik adalah peningkatan jumlah kekerasan fisik yang dialami oleh anak pada tiap tahunnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri. Tujuan utama dari pelayanan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak adalah mengembalikan kondisi anak yang bebas dari luka fisik dan traumatikanya.

Perbuatan atau tindakan meliputi pemukulan dengan benda keras, penyiksaan, penganiayaan, menjewer, menendang, menyudut dengan api rokok, menyiram air panas dan segala perbuatan lain yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, memar, lecet, lebam, luka bakar, luka berat dan cacat fisik terhadap anak. Adanya kekerasan terutama kekerasan fisik yang dialami oleh anak perlu adanya pelayanan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak atau biasa disebut child abuse merupakan gambaran berbagai bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak. Tindak kekerasan dapat dilihat dari tindakan terhadap fisik dan kejiwaan atau mental anak. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, pemerkosaan dan hukuman fisik lainnya. Hal ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi anak serta tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia.

Problematisasi tentang finansial keluarga yang kurang bahkan tidak ada dapat menciptakan berbagai macam persoalan baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali dilampiaskan terhadap anaknya oleh orang tua. Tidak jauh juga tentang permasalahan keluarga mungkin karena tidak sukanya orang tua terhadap anak yang nakal, cacat, ataupun susah untuk diatur karena dalam hirarki keluarga orang tua merupakan tingkat tertinggi bebas melakukan apapun di dalam keluarga khususnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya karena memiliki sifat pemarah dan tidak sabaran.

Banyak masyarakat yang tidak menyadari dari bahayanya akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Anak yang merupakan generasi emas yang perlu tumbuh kembang dengan sehat guna untuk menjadikan seorang yang berkualitas serta berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat atau lingkungan dan juga negara yang semuanya dipengaruhi oleh adanya perlindungan hak anak dan perlindungan dari berbagai

bentuk kekerasan. Namun, masyarakat pada umumnya yang sangat dekat dengan anak tidak menyadari akan bahayanya pengaruh dari akibat kekerasan yang dialami oleh anak.

Beberapa dampak kekerasan terhadap anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu (1) Secara fisik, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik akan terlihat dari perubahan bentuk fisik yang ada baik berupa lebam-lebam pada permukaan kulit, benjol-benjol, luka, patah tulang, sehingga berdampak pada cacat, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak; (2) secara psikis, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara psikis akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial, tidak peduli dengan lingkungan, menyendiri; secara sosial, anak yang mengalami kekerasan cenderung berperilaku menyimpang. Anak dapat menutup diri dari pergaulan dan tidak memiliki kecerdasan interpersonal dan intra personal.

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama.

Pendampingan sosial merupakan salah satu strategi pelayanan. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, untuk membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri, pendampingan terhadap klien merupakan partisipasi nyata sebagai wujud kepedulian terhadap mereka. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung.

Pelayanan sosial melalui pendampingan anak korban kekerasan fisik dilakukan ketika klien atau korban melapor ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Selain itu Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur melakukan home visit terkait dari adanya korban kekerasan fisik. Home visit dilakukan setelah adanya pelaporan baik dari anak korban kekerasan sendiri, orang

tua korban atau masyarakat sekitar rumah korban. Sebagaimana yang telah Ibu Noer Hayati diungkapkan sebagai berikut:

“...pendampingan dari kami tergantung pada laporan masuk, biasanya korban kekerasan fisik melapor pada polisi namun terkadang datang ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur bertugas dalam pendampingan anak korban kekerasan fisik dari awal pelaporan sampai mediasi serta putusan akhir...”(Sumber data primer, 16 Juli 2018)

Pernyataan ini senada dengan yang diungkapkan oleh pendamping anak korban kekerasan fisik Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yaitu Bapak Priyono Adi Nugroho:

“...Kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mendampingi dalam wilayah Jawa Timur terutama di Surabaya. Pelaksanaan pendampingan ketika klien telah menjadi korban atau kami melakukan kunjungan atau home visit pada korban kekerasan...”(Sumber data primer, 13 Juli 2018)

Data yang diperoleh melalui metode wawancara ini juga didukung oleh data yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi dan dokumentasi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian ditemukan adanya pendampingan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang dimulai dari laporan masuk yang akan dilanjutkan kunjungan (*home visit*) atau korban dapat langsung datang melapor. Pendampingan dilakukan mulai dari pelaporan, mediasi sampai putusan akhir. Selain itu, pendampingan dilakukan setiap saat dan ketika dibutuhkan. Setiap saat disini dimaksudkan adalah tanpa adanya batasan waktu setiap kali Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dibutuhkan oleh klien atau korban baik sewaktu jam kerja kantor ataupun diluar jam kantor.

Model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur selain strategi home visit namun juga menggunakan strategi rujukan, monev dan terminasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Priyono Adi Nugroho :

“...Strategi pelayanan dilakukan dimulai dari mencari kebutuhan anak yang menjadi korban tersebut. Sebelumnya diantarkan ke psikolog untuk menggali penyebab trauma psikisnya karena kekerasan fisik bias juga berdampak pada psikologisnya. Setelah melakukan pendampingan dengan cara menggali informasi dan mengurangi diantarkan ke rumah sakit untuk menangani salah satu bentuk kekerasan fisik. Intinya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memberikan bantuan apa yang dibutuhkan anak korban kekerasan fisik dulu, apakah butuh penanganan rumah sakit, pelaporan ke pada pihak berwajib seperti polisi, atau penanganan trauma psikisnya.” (Data primer, 13 Juli 2018)

Pernyataan ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Adi Kurniawan selaku divisi pelayanan anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sebagai berikut

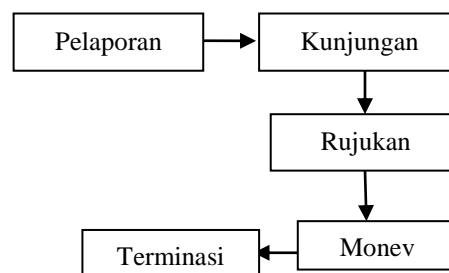
“...strateginya yaitu On the spot, saat laporan masuk langsung ke TKP/ lokasi; Home visit, sesuai dengan kebutuhan korban; Rujukan, sesuai dengan kebutuhan korban; Monev sesuai dengan waktu dan kebutuhan korban; Terminasi, apabila dianggap selesai maka korban sudah selesai pendampingan...” (Data primer, 28 Juli 2018)

“...evaluasi dilakukan dengan pemantauan perkembangan anak, tentunya pendamping bekerjasama dengan keluarga tentang masalah pemantauan perkembangan anak. disini anak dipantau tentang perkembangan pola perilaku, pola belajar maupun pola berbicara anak apakah semuanya sudah mulai berubah setelah di adakan pendampingan.”

“... jadi pada terminasi ini anak akan kita kembalikan kepada keluarganya mbak. Karena ya anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Disini kami hanya membantu untuk menetaskan permasalahan anak. Kami tetap monitor anak lewat keluarga dan nanti pelan-pelan aka kami lepas dan kembalikan kepada keluarganya. Tetapi anak yang memerlukan rehabilitasi mbak akan kami rujuk ke panti rehabilitasi anak yang kebetulan bertempat di Kota Blitar mbak Ummi.”

(Data primer, 28 Juli 2018)

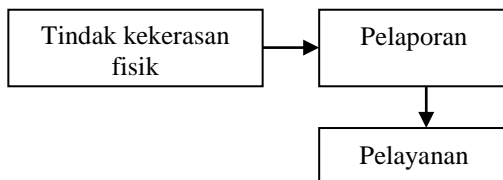
Berdasarkan hasil wawancara model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah dimulai dengan mencari kebutuhan anak yang menjadi korban kekerasan fisik yang sebelumnya diantar ke psikolog untuk mengetahui penyebab trauma psikisnya karena kekerasan fisik bisa juga berdampak psikologisnya. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memberikan bantuan apa yang dibutuhkan anak korban kekerasan fisik dulu, apakah butuh penanganan yang ditujukan ke rumah sakit, pelaporan ke pihak berwajib seperti polisi atau penanganan trauma psikisnya. Selain itu, Model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sebagai berikut :



Bagan 1 : Model Pelayanan Sosial Anak Korban Kekerasan Fisik di LPA Jatim

Pertama, Pelaporan yakni pelayanan saat laporan masuk langsung di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur seperti klien atau korban langsung melapor atau menghubungi pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur secara langsung.

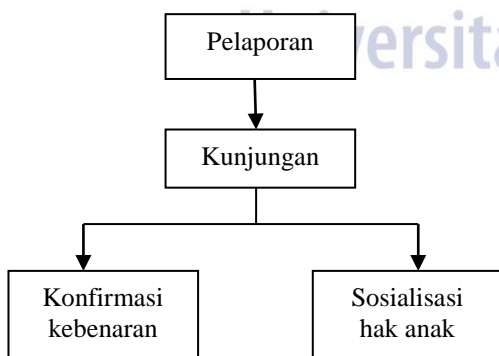
Pelaporan merupakan tahap pertama yang dilalui dalam pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Proses pelayanan ini merupakan kontak awal anatar pendamping dengan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.



Bagan 2. Alur pelaporan

Kedua, Kunjungan, Proses kunjungan ini merupakan tahapan kedua setelah adanya pelaporan. Kegiatan proses kunjungan disebut juga dengan strategi *Assesment* (penilaian) berupa melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya pemecahan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta merumuskan masalah yang dihadapi penerima pelayanan.

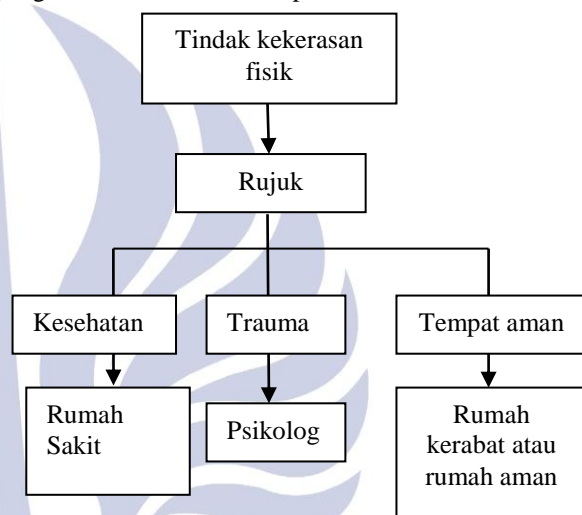
Menurut hasil wawancara kunjungan diperlukan dalam penanganan klien atau korban yang dilaporkan oleh orang lain sehingga pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memerlukan tinjauan secara langsung untuk memastikan kebenaran adanya kekerasan fisik yang dialami oleh anak atau tidak, selain itu home visit juga tidak hanya untuk memastikan adanya sebuah kekerasan tetapi juga dapat sebuah upaya untuk memberikan pengertian baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, instansi serta dunia pendidikan tentang hak-hak anak yang perlu kita lindungi bersama.



Bagan 3. Alur Kunjungan

Ketiga, Rujukan, ketika adanya sebuah tindak kekerasan fisik terhadap anak dan anak tersebut memerlukan sebuah penanganan yang serius baik dari segi

kesehatan, psikisnya, pendidikannya. Lembaga Perlindungan Anak memberikan bantuan berupa dirujuknya korban kekerasan fisik tersebut ke mitra yang sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan fisik. Korban bisa di rujuk ke rumah sakit jika mengalami luka, pelaporan polisi jika korban merasa takut dan adanya bukti yang kuat terhadap orang yang akan dilaporkan yang telah menganiayanya, mendatangkan psikolog jika mengalami trauma atau jika korban membutuhkan tempat yang aman dan nyaman dari kekerasan pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur akan merujuknya di Rumah Aman khusus untuk anak-anak yang mengalami masalah di rumah ataupun yang membutuhkan sebuah pemulihan.



Bagan 4. Alur rujukan

Keempat, Monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu dan kebutuhan korban. Evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan anak. Dalam pemantauan perkembangan anak, pendamping yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi bekerjasama dengan keluarga. Pada tahap evaluasi, pekerja sosial melakukan penilaian kembali semua kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilan maupun hambatan-hambatan. Dalam tahap ini pekerja sosial memulai kembali apa yang telah dilakukan. Evaluasi merupakan unsur yang cukup penting dalam pelayanan, karena memungkinkan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memberikan respon dan pertanggungjawaban, baik kepada klien atau korban maupun kepada keluarga korban. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali semua kegiatan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan, kegagalan dan juga kendala.

Kelima, tahapan terminasi sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan pendamping anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sebagai fasilitator sudah akan mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai

tahapan pemutusan hubungan antara pendamping dengan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur secara bertahap. Terminasi adalah perencanaan awal kerjasama antara pekerja sosial dengan klien, terminasi dapat meningkatkan fungsi sosial klien dan juga dapat mengembangkan pengertian antara klien dan pekerja sosial saat mereka bekerja sama. Tidak hanya pekerja sosial yang melakukan tahapan ini. Akan tetapi, para pengurus yayasan yang bekerja dengan anak juga sebaiknya melakukan tahap-tahap proses pekerjaan sosial didalam memberikan pelayanan sosialnya bagi anak jalanan.

Dapat diketahui bahwa model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah sebagai berikut: (1) identifikasi. Menelaah laporan yang masuk dari masyarakat atau profesi lainnya seperti guru, polisi dan aparat hokum; (2) investigasi. Pendamping melakukan kunjungan rumah, wawancara dengan anak atau keluarga korban mengenai laporan yang telah masuk; (3) intervensi. Pemberian pertolongan terhadap anak korban kekerasan yang dapat berupa bantuan ataupun rujukan; (4) Terminasi pengakhiran atau pemutusan.

Tugas pendamping disini membantu anak untuk mengentaskan atau membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi pada keluarga mengenai apa itu Lembaga Perlindungan Anak, tugas Lembaga Perlindungan Anak. Selain sosialisasi, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur juga mengadakan sharing tentang keluh kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak. Selain itu, ada juga untuk pemenuhan kebutuhan anak..

Adapun pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan pendampingan. Bentuk evaluasinya yaitu internal evaluasi secara menyeluruh, atau lembaga sendiri, pengurus sendiri serta pengawas tersendiri. Dulu Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur bentuknya lembaga namu sekarang perkumpulan. Jadi strukturnya pembina, pengawas, pengurus, staf dan relawan. Secara lebih tinggi lagi masyarakat diwakilkan oleh stakeholder sebagai member dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur ini, jadi setiap tahun ada pertemuan dan pertanggung jawaban secara menyeluruh. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Adi Kurniawan, "...evaluasi secara fisik, psikis baik dari anak korban, keluarga, masyarakat sekitar dan sekolah. Jika semua mendukung pemulihan dan korban telah pulih maka evaluasi bisa dilakukan dan terminasi...."(Data Primer, 24 Juli 2018).

Dari segi evaluasi tentang pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dilakukan dengan melihat perkembangan anak, seperti perilaku anak yang sudah mulai ceria, terbuka dalam menyampaikan informasi atau konsultasi yang mengarah berubah lebih baik dari sebelumnya yang bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

Pada pelaksanaan pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Adi Kurniawan selaku Divisi Layanan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur:

"...Faktor Pendukung yang pertama keluarga yang memahami kondisi korban, masyarakat yang memiliki kepercayaan dalam pemulihan korban, Dinas terkait misal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan panti sosial, SDM dari pendamping dan lembaganya bila ada, aparat Penegak Hukum yang berperspektif anak." (Data Primer 24 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Adi Kurniawan selaku Divisi Layanan Anak, faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan fisik:

Pertama, pemahaman orang tua yang memahami kondisi korban kekerasan fisik serta adanya kepercayaan masyarakat yang mendukung adanya pemulihan korban kekerasan fisik anak. Kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting dengan adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaan atau prasangka, sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

Kedua, jaringan kerjasama yang banyak. Pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur melakukan kerjasama dengan dinas terkait misalnya panti sosial dinas perlindungan perempuan dan anak, polisi, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur melakukan kerjasama ke panti-panti sosial yang dapat digunakan sebagai shelter untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapatujuk di panti tersebut. Kerjasama pada pihak kepolisian sehingga dapatt dngan cepat mengetahui apabila ada kasusu kekerasan yag dialami anak. Selin itu juga kerjasama dengan rumah sakit yang digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi anak korban kekerasan fisik.

Ketiga, SDM pendamping dari sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, dimana ilmu yang di dapat sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai pendamping.

Selain itu faktor pendukung pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik adalah sosialisasi dalam pencegahan kekerasan fisik antara lain sosialisasi. Media sosialisasi LPA Jatim melalui pamflet, poster, dan media elektronik. Materi sosialisasi sesuai dengan tujuan LPA atim yakni tentang hak-hak anak meliputi penyebab, dampak dan cara mengasuh anak dengan baik sehingga bebas dari tindak kekerasan fisik. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan seluruh wilayah Jawa Timur.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Adi Kurniawan:

“...Faktor Penghambatnya yaitu perspektif keluarga yang menyalahkan korban; masyarakat yang belum memiliki pemahaman tentang perlindungan anak sehingga muncul Stigma dan Diskriminasi; ketidaksiapan Dinas terkait/ Pemerintah Daerah baik dari segi SDM, Penganggaran, program dan sistem perlindungan anak; aparat penegak hukum yang tidak berperspektif perlindungan anak masih ada; media yang tidak terkontrol dalam memberitakan korban dan keluarganya.”

(Sumber data primer, 24 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Adi Kurniawan yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah:

Pertama, perspektif keluarga yang menyalahkan anak yang sebagai korban. Keluarga menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan serigkali menjadi faktor penghambat karena keluarga akan menyalahkan anak ketika anak menjadi korban kekerasan fisik. Selain itu, masyarakat yang belum memiliki pemahaman tentang perlindungan anak sehingga muncul diskriminasi.

Masyarakat yang belum sadar tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seringkali membiarkan anak yang sedang mengalami kekerasan fisik baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sehingga Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur seringkali mendapatkan kesulitan untuk menangani anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Kedua, ketidaksiapan Dinas terkait/ Pemerintah Daerah baik dari segi Penganggaran, program dan sistem perlindungan anak. Kesiapan dinas atau pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pendampingan anak

korban kekerasan fisik baik dari penganggaran untuk biaya sewaktu penanganan yang dilakukan oleh pendamping serta program dan sistem perlindungan anak yang belum ada ataupun masih lemah bagi anak yang belum atau sudah mengalami kekerasan.

Selain itu, faktor penghambat dalam pelayanan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah kekurangan SDM seperti yang diungkapkan oleh Bapak Priyono Adi Nugroho: “....penghambatnya adalah Kami juga kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal.”(Data Primer, 13 Juli 2018).

Pernyataan Bapak Priyono Adi Nugroho yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya SDM di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sehingga menyebabkan pendampingan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Kurangnya SDM ini menjadi tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak yang ditangani banyak tetapi SDM yang tersedia sedikit sehingga pendamping tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Faktor penghambat lainnya adalah pelaporan kekerasan hanya dilakukan pihak keluarga dalam lingkungan masyarakat, pendidikan, dan fasilitas umum jarang melakukan pelaporan atas tindak kekerasan fisik pada anak. Penyebabnya menurut penuturan Pak Priyono Adi Nugroho sebagai berikut:

“...Pengaduan kekerasan jarang dilakukan oleh selain keluarga karena anak takut menceritakan kekerasan yang dialami pada orang lain, kekerasan terhadap anak adalah masalah keluarga dan orang lain tidak harus mencampurinya. kekerasan terutama kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga jika tersebar di masyarakat, keluarga menjadi malu, dan anak menjadi tercemar dan dikucilkan dalam pergaulan karena pernah menjadi korban kekerasan” (Data Primer, 13 Juli 2018).

Penyebab pengaduan kekerasan terhadap anak sedikit dilakukan oleh guru atau masyarakat karena takut menceritakan kekerasan yang dialami pada orang lain. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa masalah anak adalah masalah bersama bukan hanya masalah keluarga. menjadi korban tindak kekerasan merupakan aib keluarga, keluarga menjadi malu, dan membuat anak menjadi terisolasi dari pergaulan.

Dampak pelaksanaan pelayanan sosial menggambarkan keberhasilan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan fisik seperti hilangnya trauma, sembuh luka fisik yang diakibatkan kekerasan, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Priyono Adi Nugroho:

“...Ketika trauma sudah hilang karena kekerasan fisik tidak hanya sakit di fisik juga tapi dalam psikisnya anak seperti malu, sakit hati serta dendam.”(Sumber data primer, 13 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Priyono adi Nugroho dampak pelaksanaan pelayanan sosial pada anak korban kekerasan fisik adalah trauma kekerasan fisik yang dialami oleh anak sudah hilang selain itu pulihnya psikis anak seperti rasa malu, sakit hati atau dendam. Namun dampak keberhasilan yang di lakukan masih memiliki kekurangan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Adi Kurniawan:

“...Gambaran keberhasilan untuk program pendampingan bagi anak di Jawa Timur masih jauh. Untuk Kota Surabaya sendiri yang memiliki predikat Kota Layak Anak masih perlu banyak pembenahan. Karena ketidaksiapan sistem yang dibangun, sistem perlindungan anak yang terkesan di penanganan dan bukan pencegahan. Sehingga anggaran perlindungan anak sangat sedikit karena ada kasus baru ada penanganan. Padahal jika dibangun sistem, maka pencegahan bisa dibangun lebih besar untuk pengurangan penanganan. Artinya keluarga, masyarakat, sekolah dan pihak terkait bisa saling dukung untuk pencegahan.” (Data Primer, 24 Juli 2019).

Pernyataan Bapak Adi Kurniawan sebagai pendamping serta Divisi Layanan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah gambaran keberhasilan program pendampingan anak korban kekerasan Fisik di Jawa Timur masih jauh atau kurang. Dilihat dari kota Surabaya yang masih perlu banyak pembenahan dalam pencegahan kekerasan fisik pada anak. Pencegahan bisa dimulai dari keluarga, masyarakat, sekolah . sehingga sistem perlindungan anak yang dibangun menjadi sistem pencegahan kekerasan fisik yang terjadi pada anak.

Dampak pelaksanaan pendampingan menggambarkan keberhasilan LPA Jatim dalam melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan fisik seperti hilangnya trauma, sembuhnya luka fisik yang diakibatkan kekerasan, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Priyono adi Nugroho:

“...Ketika trauma sudah hilang karena kekerasan fisik tidak hanya sakit di fisik juga tapi dalam psikisnya anak seperti malu, sakit hati serta dendam.”(Sumber data primer, 13 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Priyono Adi Nugroho dampak pelaksanaan pendampingan pada anak korban kekerasan fisik adalah trauma kekerasan fisik yang dialami oleh anak sudah hilang selain itu pulihnya psikis anak seperti rasa malu, sakit hati atau dendam. Pulihnya psikis korban/hilangnya rasa trauma. Setelah dirujuk oleh lembaga ke psikolog,

anak/korban yang mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang dialaminya, kondisi psikologinya sudah berangsur membaik walaupun tidak saklek. Akan tetapi, pihak keluarga juga mendapatkan penanganan dari psikologi agar mereka dapat membantu anak untuk memulihkan kondisi psikologinya yaitu dengan penguatan keluarga. Jadi, pihak keluarga juga harus bekerjasama agar tidak terjadi trauma yang ke-dua bagi anak tersebut.

Pendampingan diberikan untuk pemenuhan hak anak. Prinsip pendampingan dilakukan pendamping anak LPA Jatim dengan tidak ada diskriminasi dan pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Pendampingan terhadap anak dengan melakukan visum dan pemulihan luka fisik ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Pendampingan dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak yang menjadi korban kekerasan. Pendampingan psikososial yang diberikan dengan mendengarkan keluhan dan memberi solusi terbaik bagi korban. Pendampingan tidak hanya secara fisik tapi bisa melalui konsultasi. Anak yang mengalami trauma akan mendapatkan pendampingan psikologis sendiri jika tidak mampu maka akan didampingi ke psikolog, misalnya ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Karangmenjangan, Psikiater.

Berikut ini pernyataan dari orang tua terkait dengan dampak dari pelaksanaan pendampingan. Pernyataan dari ibu klien korban kekerasan fisik :

“...saya sangat senang dengan adanya pendampingan ini. Anak saya yang tadinya gak bisa baca menjadi bisa baca setelah dicarikan guru les sama Bapak Priyono dan Ibu Noer. Anak saya juga diikutkan sekolah kejar paket A untuk mendapatkan ijazah setara SD karena dulu anak saya berhenti sekolah waktu kelas 2 SD. Sosialisasi di lingkungan juga sudah lumayan baik. Tidak ada trauma yang mendalam yang dialami anak saya karena waktu mengalami tindak kekerasan usianya masih TK”(Data primer, 24 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh ibu klien dapat disimpulkan bahwa ibu klien (orang tua) sangat senang dengan adanya pendampingan ini dan mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini. Perubahan yang terjadi pada anak atau klien tidak langsung secara saklek. Walaupun belum maksimal tetapi tetap ada perubahan yang terjadi pada diri anak/klien dibandingkan sebelum adanya pendampingan.

Perubahan yang terjadi pada diri anak misalnya perubahan perilaku walaupun sangat sulit untuk mengukur perubahan perilaku, perubahan pola belajar (menjadi

lebih semangat dalam belajar) dan juga perubahan pola pikir (memiliki semangat yang tinggi untuk tetap meneruskan perjalanan hidup).

Pelayanan pendampingan pada anak korban kekerasan fisik dilakukan intensif selama enam bulan dengan jadwal kunjungan dua minggu sekali pada anak korban kekerasan. Pengurus LPA Jatim yang lain juga ikut dalam pelayanan pendampingan ketika melakukan kunjungan dan pendampingan pada anak. Pendampingan bisa dari rujukan LPA Jatim, dari Dinas Sosial dan/temuan langsung pada anak. LPA Jatim bekerjasama dengan Pekerja Sosial yang menjadi jaringan dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Anak yang menjadi pelaku kekerasan jarang mendapatkan pendampingan juga, jika anak tersebut membutuhkannya. Anak yang menjadi pelaku kekerasan jarang mendapatkan pendampingan. Pelaku akan mendapatkan pendampingan jika ia membutuhkannya. Berikut penuturan bu Nisa tentang pendampingan bagi anak menyatakan:

“...Pendampingan ini bisa mengembalikan kondisi anak secara psikis dan sosial dalam kondisi semula melalui pendekatan ke anak, orang tuanya dan orang-orang disekitar korban mbak. Tapi tetap melibatkan anak karena sasarannya anak. Mengutamakan partisipasi anak, ketika kita kunjungi dia ke sekolah dia gak nyaman maka kita tidak akan melakukan itu lagi, pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak. Pendampingan pada anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual maupun sosial perlakuannya tetap sama disesuaikan kebutuhan anak dengan pemberian motivasi dan bimbingan dan penguatan keluarga juga. Indikator keberhasilan pendampingan pada anak jika anak telah pulih kembali dari rasa trauma, dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan, tumbuhnya percaya diri dan kemandirian anak, tidak menutup diri lagi dan anak bisa melakukan aktifitas seperti sebelum menjadi korban kekerasan.” (Data primer, 24 Juli 2018).

Pendampingan dilakukan untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula melalui pendekatan ke anak, orang tua, dan orang-orang disekitar anak yang menjadi korban. Pendampingan lebih mengutamakan partisipasi anak. Mendampingi anak jika perlu di sekolah. Pelaku kekerasan akan mendapatkan pendampingan juga jika ia membutuhkan pendampingan secara psikososial. Pendampingan pada anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual maupun sosial perlakuannya tetap sama disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan pemberian motivasi dan bimbingan dan penguatan keluarga. Indikator keberhasilan pendampingan pada anak jika

anak telah pulih kembali dari rasa trauma, dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan, tumbuhnya percaya diri dan kemandirian anak, tidak menutup diri lagi dan anak bisa melakukan aktifitas seperti sebelum menjadi korban kekerasan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai bukti untuk memperkuat data penelitian mengenai model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Dari rumusan masalah tersebut telah didapatkan atas jawaban dari beberapa informan.

Adanya pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dimulai dari laporan masuk yang akan dilanjutkan kunjungan (*home visit*) atau korban dapat langsung datang melapor. Pelayanan dilakukan mulai dari pelaporan, mediasi sampai putusan akhir. Selain itu, pendampingan dilakukan setiap saat dan ketika dibutuhkan. Setiap saat disini dimaksudkan adalah tanpa adanya batasan waktu setiap kali Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dibutuhkan oleh klien atau korban baik sewaktu jam kerja kantor ataupun diluar jam kantor.

Menurut penjelasan dari beberapa informan yang sudah ditentukan menjelaskan bahwa model pendampingan yang digunakan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dilakukan model pendampingan melalui beberapa strategi yaitu pendampingan saat laporan masuk, kunjungan, rujukan korban kekerasan fisik, monitoring dan evaluasi dan tahapan terminasi.

Dari beberapa model pendampingan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, sesuai dengan teori model pelayanan sosial bagi anak menurut teori model pelayanan *Half-way House Services* menurut Soetarso (1996) yang terdiri dari identifikasi masalah; penyelidikan; intervensi sosial dan terminasi. Dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak dikenal juga dengan proses pertolongan atau proses pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial sebagai wujud praktik dari pekerjaan sosial, maka pelayanan sosial yang diberikan pendamping berkaitan dengan proses pekerjaan sosial.

Pada pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur menggunakan Model pelayanan sosial bagi anak dengan beberapa strategi yakni: (1) Pelaporan; (2) Kunjungan; (3) Rujukan; (4) Monev; (5) Terminasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penanganan saat laporan masuk langsung di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur seperti klien atau korban langsung melapor atau menghubungi pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur secara

langsung. Korban atau klien yang mengalami kekerasan, masyarakat serta keluarga dari korban kekerasan fisik jika ingin melapor adanya tindak kekerasan fisik sangat mudah. Hal ini dikarenakan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur bersedia menerima pelaporan tanpa adanya batasan waktu. Namun, dengan adanya keterbatasan jumlah pendamping pelayanan dilakukan kurang maksimal dibuktikan prosesnya lama serta memakan banyak waktu jika di daerah pelapor sangat sulit diakses.

Untuk mengatasi pelayanan yang lama Lembaga Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik bekerjasama dengan banyak instansi. Salah satunya yaitu lembaga kemasyarakatan yang melayani pendampingan sosial khususnya anak contohnya yaitu Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur bekerjasama dengan rumah aman di daerah terdekat pelapor.

Namun, tidak semua daerah Jawa Timur memiliki lembaga kemasyarakatan yang menangani pelayanan sosial anak khususnya korban kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan ada tidaknya kepedulian serta kesadaran pemerintah daerah serta masyarakat tentang adanya perlindungan anak beserta haknya.

Kedua, Kunjungan diperlukan dalam penanganan klien atau korban yang dilaporkan oleh orang lain sehingga pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memerlukan tinjauan secara langsung untuk memastikan kebenaran adanya kekerasan fisik yang dialami oleh anak atau tidak. Kunjungan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sangat membantu korban kekerasan fisik jika pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat atau anggota keluarga adanya kebenaran. Jika benar adanya tindak kekerasan fisik, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur akan segera menangani tindak kekerasan fisik yang terjadi.

Selain itu, anak akan mendapatkan pelayanan serta pertolongan dengan tepat. Namun, kunjungan ini bisa tidak berjalan lancar jika keluarga atau orang tua menutupi adanya tindak kekerasan fisik yang terjadi di rumahnya. Kunjungan juga merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengertian baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, instansi serta dunia pendidikan tentang hak-hak anak yang perlu kita lindungi bersama. Maka dari itu perlu adanya kepercayaan dari semua pihak.

Namun, hal ini tidak berjalan baik jika orang tua, keluarga serta masyarakat bersikap acuh terhadap anak beserta haknya. Hal ini yang menjadi ancaman Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam melakukan pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik.

Ketiga, ketika adanya sebuah tindak kekerasan fisik terhadap anak dan anak tersebut memerlukan sebuah penanganan yang serius baik dari segi kesehatan, psikisnya, pendidikannya. Lembaga Perlindungan Anak memberikan bantuan berupa dirujuknya korban

kekerasan fisik tersebut ke mitra yang sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan fisik.

Korban bisa dirujuk ke rumah sakit jika mengalami luka, pelaporan polisi jika korban merasa takut dan adanya bukti yang kuat terhadap orang yang akan dilaporkan yang telah menganiayanya, mendatangkan psikolog jika mengalami trauma. Rujukan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur terkadang mengalami hambatan yaitu dari pihak mitra yang kurang cepat ataupun ketika mendatangkan seorang psikolog juga membutuhkan tempat yang aman serta nyaman. Karena, terkadang pelapor atau anak korban kekerasan fisik di rumahnya dia merasa tidak nyaman jika mengalami tindak kekerasan dari pihak keluarganya sendiri.

Kerjasama dengan tempat yang aman di luar rumah serta Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur lebih leluasa dalam melakukan pelayanan sangat diperlukan. Salah satu tempat untuk korban kekerasan fisik membutuhkan tempat yang aman dan nyaman yaitu dengan merujuknya di Rumah Aman khusus untuk anak-anak yang mengalami masalah di rumah ataupun yang membutuhkan sebuah pemulihan.

Keempat, monitoring dalam pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sesuai dengan waktu dan kebutuhan korban. Evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan anak oleh pendamping dalam pelayanan. Yang menjadi penghambat dalam pelayanan monitoring tersebut adalah kurangnya tenaga SDM yang sesuai dengan kriteria pendamping dalam pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Dalam pemantauan perkembangan anak, pendamping yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi bekerjasama dengan keluarga. Evaluasi yang dilakukan bersama keluarga diharapkan agar anak tertangani dengan baik serta pelayanan yang dilakukan banyak yang mendukung oleh semua pihak sehingga dapat berjalan sesuai rencana langkah-langkahnya. Namun, terkadang sering ditemukan keluarga tidak ikut dalam peran dalam pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Kelima, terminasi merupakan sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan pendamping anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sebagai fasilitator sudah akan mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai tahapan pemutusan hubungan antara pendamping dengan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur secara bertahap.

Berdasarkan model pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur tersebut menjadikan anak korban kekerasan fisik sebagai

seseorang yang harus dilindungi dengan tercapai perlindungan haknya, tercapainya keamanan serta kenyamanan dengan dirujuknya sesuai kebutuhan anak, serta yang terakhir tercapainya tujuan anak yang bebas dari tindak kekerasan khususnya kekerasan fisik.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan tentang model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah model pelayanan sosial anak dengan model landasan teori model pelayanan *Half-Way House Services* pada anak yang menjadi fokus pelayanannya. Model pelayanan sosial anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur terdiri dari beberapa strategi yakni sebagai berikut: (a) Laporan; (b) Konseling; (c) Rujukan; (d) Monitoring dan evaluasi; (e) Terminasi, ahapan ini disebut sebagai tahapan pemutusan hubungan antara pendamping dengan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur secara bertahap.

Faktor pendukung dalam model pelayanan sosial anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yakni: (1) pemahaman orang tua yang memahami kondisi korban kekerasan fisik serta adanya kepercayaan masyarakat yang mendukung adanya pemulihan korban kekerasan fisik anak; (2) jaringan kerjasama yang meliputi dinas kesehatan, pendidikan, kepolisian serta jaringan lembaga yang bersifat perlindungan anak; (3) SDM pendamping dari sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan fisik.

Faktor penghambat dalam model pelayanan sosial anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yakni: (1) keluarga anak atau korban kurang memahami tentang perlindungan anak; (2) kekurangan SDM di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur; (3) Kesulitan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam pencegahan kekerasan fisik pada anak dikarenakan minimnya pemahaman tentang perlindungan anak dalam keluarga dan masyarakat.

Saran

Terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya: (1) bagi pendamping, meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilakukan lebih maksimal, memberikan motivasi yang lebih bagi anak korban kekerasan yang tidak mau menurut dengan apa yang dikatakan pendamping, lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan anak.; (2) bagi pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, perlu

ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan, perlu pembuatan data korban kekerasan agar lebih lengkap datanya, perlu adanya penambahan pendamping dalam melaksanakan program pendampingan anak korban kekerasan fisik; (3) Bagi orang tua anak, agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak sehingga tidak menyikapi dalam bentuk kekerasan, mendidik anak dengan baik dan penuh afeksi karena anak merupakan titipan Tuhan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah Diratifikasi Melalui Keppres No.36 tahun 1990.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Cendikia.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- KPAI. 2016. *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016*. [Online]. Diakses dari <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>
- Kurde, Arfawie Nukthoh. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutiah, Dinny. (2015). *5 Kisah Anak Korban Kekerasan Paling Memilukan Sepanjang 2015*.
- Nugroho, Adi. *Profil LPA dan Materi Pengembangan Relawan*. Brosur Disampaikan pada Wawancara Observasi tanggal Nopember 2017 di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Surabaya.
- Restuwati, Lita. 2014. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Orangtua Kandung di Kecamatan Empang-Tarano*. Jurnal Ilmiah.
- Rokhma, Ainur. 2016. *Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur di Kota Surabaya dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak dari Kekerasan*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol.2 No.4 Tahun 2016. UNESA.
- Setyawan, David. (2018). *KPAI Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Anak di Awal Tahun 2018*. [Online]. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-soroti-maraknya-kasus-kekerasan-anak-di-awal-tahun-2018/>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R2D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong.2003. *Masalah Sosial Anak*.
Jakarta:Kencana.

Sulaiman.2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk
Perguruan Tinggi*. Banda Aceh:PeNa.

